



Peran Digitalisasi Dalam Meningkatkan Efisiensi Pengelolaan Keuangan Daerah (Studi Kasus Pada Kota Medan)

Balqis Zhofayra Alya¹, Fauziah Hanum², Nasirwan³, Samsurijal Hasan⁴, Dewi Urip Wahyuni⁵
balqiszhofayraalyaa@gmail.com¹, fauziahhanum0308@gmail.com², nasirwan@unimed.ac.id³,
samsurijal@universitaspahlawan.ac.id⁵, dewiuripwahyuni@stiesia.ac.id⁶

^{1,2,3} Universitas Negeri Medan

⁴ Universitas Pahlawan Tuanku Tambusai

⁵ Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Indonesia (STIESIA) Indonesia

Article Info

Article history:

Received Januari 12th, 2024

Revised Februari 20th, 2024

Accepted Februari 26th, 2024

Kata Kunci:

Digitalisasi Keuangan

Efisiensi Anggaran

Transparansi

Akuntabilitas

Kota Medan

ABSTRAK

Penelitian ini menganalisis peran digitalisasi dalam meningkatkan efisiensi pengelolaan keuangan negara dan daerah, dengan studi kasus di Kota Medan. Perkembangan teknologi digital telah membawa perubahan signifikan dalam administrasi keuangan pemerintah, terutama melalui penerapan sistem e-budgeting, e-audit, dan e-procurement. Digitalisasi memungkinkan pencatatan yang lebih akurat, meningkatkan transparansi, serta mengurangi risiko penyimpangan anggaran. Meskipun demikian, implementasi digitalisasi menghadapi berbagai tantangan, seperti keterbatasan infrastruktur, rendahnya literasi digital aparatur negara, serta risiko keamanan data. Studi ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan Analisis Sekunder Kualitatif (QSA) untuk mengevaluasi kebijakan dan dampak digitalisasi terhadap pengelolaan keuangan daerah. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan digitalisasi keuangan di Kota Medan telah meningkatkan transparansi dan akuntabilitas, tetapi masih memerlukan optimalisasi dalam hal infrastruktur teknologi dan penguatan regulasi. Oleh karena itu, strategi seperti peningkatan kapasitas SDM, penguatan sistem keamanan data, serta integrasi sistem keuangan pusat dan daerah sangat diperlukan untuk mendukung efektivitas digitalisasi dalam pengelolaan keuangan daerah.

ABSTARCT

This study analyzes the role of digitalization in enhancing the efficiency of state and regional financial management, with a case study in Medan City. The advancement of digital technology has significantly transformed government financial administration, particularly through the implementation of e-budgeting, e-audit, and e-procurement systems. Digitalization enables more accurate financial recording, increases transparency, and reduces the risk of budget deviations. However, its implementation faces several challenges, such as limited infrastructure, low digital literacy among government officials, and data security risks. This study employs a qualitative method with a Qualitative Secondary Analysis (QSA) approach to evaluate policies

and the impact of digitalization on regional financial management. The findings indicate that digital financial implementation in Medan City has improved transparency and accountability but still requires optimization in technological infrastructure and regulatory strengthening. Therefore, strategies such as enhancing human resource capacity, strengthening data security systems, and integrating national and regional financial systems are essential to support the effectiveness of digitalization regional financial management. Keywords: Financial Digitalization, Budget Efficiency, Transparency, Accountability, Medan City



© 2024 Para Penulis. Diterbitkan oleh Perkumpulan Konsultan Manajemen Pendidikan Indonesia (PKMPI). Ini adalah artikel akses terbuka di bawah lisensi CC BY-NC-SA (<https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0>)

Corresponding Author:

Nama Penulis, Balqis Zhofayra Alya
Affiliation Universitas Negeri Medan
Email: penulis balqiszhofayraalyaa@gmail.com

Latar Belakang

Perkembangan teknologi digital telah membawa perubahan besar dalam berbagai sektor, termasuk dalam pengelolaan keuangan negara dan daerah. Digitalisasi keuangan menjadi salah satu langkah penting dalam reformasi birokrasi guna meningkatkan efisiensi, transparansi, serta akuntabilitas tata kelola keuangan publik (Iswandari, 2021). Dengan penerapan sistem berbasis digital, proses administrasi keuangan menjadi lebih cepat dan akurat, sehingga dapat meminimalkan kesalahan pencatatan serta mengurangi potensi penyimpangan anggaran. Di Kota Medan, pengelolaan keuangan daerah juga mengalami berbagai tantangan dan perkembangan seiring dengan implementasi sistem digital. Pemerintah Kota Medan telah menerapkan berbagai kebijakan berbasis teknologi guna meningkatkan transparansi dan efisiensi dalam pengelolaan anggaran. Salah satu langkah signifikan yang telah diterapkan adalah penggunaan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) yang memungkinkan integrasi data keuangan secara lebih terstruktur.

Selain itu, penerimaan pajak daerah dan retribusi daerah juga memiliki peran penting dalam mendukung efektivitas pengelolaan keuangan daerah. Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Kota Medan, sebagaimana di daerah lain di Sumatera Utara, sangat bergantung pada optimalisasi penerimaan pajak dan retribusi. Namun, tantangan seperti rendahnya tingkat kepatuhan masyarakat dalam pembayaran pajak serta keterbatasan infrastruktur teknologi masih menjadi kendala utama dalam upaya peningkatan PAD (Harefa & Tampubolon, 2021). Oleh karena itu, optimalisasi sistem digital dalam pengelolaan keuangan daerah terus menjadi fokus utama dalam meningkatkan efektivitas tata kelola pemerintahan di Kota Medan.

Sebelumnya, sistem pengelolaan keuangan di banyak daerah masih menggunakan metode manual yang sering kali memakan waktu lama dan berisiko tinggi terhadap kesalahan manusia. Untuk mengatasi hal ini, berbagai inovasi digital seperti e-budgeting, e-audit, dan e-procurement mulai diterapkan agar proses pengelolaan keuangan lebih transparan dan akuntabel (Sudrajat, 2021). Melalui penggunaan sistem ini, pemerintah dapat memantau penggunaan anggaran secara real-time dan memastikan bahwa dana publik dialokasikan secara tepat sasaran (Ratnawati & Susilowati, 2022).

Dalam rangka meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan, pemerintah melakukan berbagai reformasi melalui penerbitan regulasi yang lebih ketat. Salah satu regulasi utama adalah Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, yang mengatur bahwa laporan pertanggungjawaban pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) maupun Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) harus disusun sesuai

dengan standar akuntansi pemerintahan yang telah ditetapkan dalam peraturan pemerintah. Selain itu, pemerintah juga menerbitkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, yang kemudian melahirkan berbagai kebijakan turunan, seperti Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) serta Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 yang memperbarui standar tersebut agar lebih sesuai dengan prinsip transparansi dan tata kelola keuangan yang baik (Hasanah & Siregar, 2021).

Akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan daerah menjadi salah satu aspek penting dalam reformasi ini. Akuntabilitas merupakan kewajiban untuk memberikan pertanggungjawaban, menjawab, serta menerangkan kinerja dan tindakan yang dilakukan oleh individu, badan hukum, atau pimpinan kolektif suatu organisasi kepada pihak yang memiliki hak atau wewenang untuk meminta keterangan atau pertanggungjawaban (Mahlel, Ridwan, & Nasirwan, 2016). Dengan meningkatnya tuntutan transparansi dan akuntabilitas, digitalisasi keuangan menjadi langkah strategis untuk memastikan bahwa sistem pengelolaan keuangan daerah berjalan secara efisien, akurat, dan dapat dipertanggungjawabkan kepada publik.

Di Kota Medan, salah satu tantangan dalam pengelolaan keuangan daerah adalah optimalisasi penerimaan pajak. Dinas Pendapatan Daerah Kota Medan sebagai instansi yang bertanggung jawab dalam mengelola sumber-sumber pendapatan daerah dari sektor pajak masih menghadapi berbagai kendala dalam mencapai target penerimaan. Data yang diperoleh menunjukkan bahwa target penerimaan daerah sering kali tidak tercapai, sehingga diperlukan langkah-langkah pengawasan yang lebih ketat guna mengoptimalkan dan memaksimalkan pendapatan pajak daerah (Lubis, 2018). Selain itu, dari struktur APBD yang ada, terlihat bahwa pendapatan daerah masih sangat bergantung pada dana perimbangan dari pemerintah pusat, yang lebih besar dibandingkan dengan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Di sisi belanja, kebutuhan belanja aparatur terus meningkat dibandingkan dengan belanja publik yang seharusnya lebih berorientasi pada pelayanan kepada masyarakat. Ketidakseimbangan ini menjadi salah satu tantangan dalam pengelolaan keuangan daerah yang perlu diselesaikan melalui kebijakan yang lebih efisien dan transparan. Digitalisasi keuangan diharapkan dapat membantu meningkatkan efektivitas alokasi anggaran serta memastikan bahwa belanja daerah lebih berfokus pada kepentingan masyarakat luas (Lubis & Hafni, 2017).

Pemerintah telah mengeluarkan berbagai kebijakan untuk mendukung transformasi digital dalam administrasi keuangan daerah. Salah satunya adalah Peraturan Pemerintah Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE), yang menjadi dasar dalam penerapan sistem digital di berbagai instansi pemerintahan (Kurniawan & Arti, 2020). Namun, meskipun kebijakan ini telah diterapkan, masih terdapat berbagai kendala dalam implementasinya, terutama di daerah-daerah yang memiliki keterbatasan akses teknologi dan kurangnya tenaga kerja yang memiliki kompetensi dalam pengelolaan sistem digital. Selain permasalahan infrastruktur, keamanan data menjadi tantangan yang tidak kalah penting dalam digitalisasi keuangan. Seiring dengan meningkatnya penggunaan teknologi berbasis internet, risiko terhadap kebocoran data dan serangan siber juga semakin besar. Oleh karena itu, diperlukan sistem keamanan yang kuat serta regulasi yang jelas untuk memastikan perlindungan terhadap data keuangan negara dan daerah (Iswandari, 2021). Jika aspek keamanan ini tidak ditangani dengan baik, maka kepercayaan publik terhadap digitalisasi pemerintahan bisa menurun, yang pada akhirnya akan menghambat efektivitas implementasinya.

Meskipun menghadapi berbagai tantangan, digitalisasi keuangan telah memberikan dampak positif bagi pemerintah daerah. Dengan sistem keuangan berbasis digital, proses administrasi yang sebelumnya memerlukan waktu lama dapat diselesaikan dengan lebih cepat, sehingga meningkatkan efisiensi dalam pengelolaan anggaran. Selain itu, keterbukaan informasi keuangan memungkinkan masyarakat untuk ikut mengawasi penggunaan dana publik, sehingga transparansi dan akuntabilitas dapat lebih terjaga.

Keberhasilan implementasi sistem keuangan digital di beberapa daerah menunjukkan bahwa teknologi dapat berperan besar dalam meningkatkan efektivitas pengelolaan keuangan negara dan daerah. Sebagai contoh, Pemerintah DKI Jakarta telah menerapkan Sistem Informasi Keuangan Daerah (SIKD) dan e-budgeting, yang mampu meningkatkan efisiensi serta mengurangi potensi penyalahgunaan dana (Ningtyas & Angin, 2024). Keberhasilan serupa juga terlihat di beberapa kota lain yang telah mengadopsi sistem serupa dan menunjukkan peningkatan dalam transparansi keuangan daerah. Namun, digitalisasi tidak hanya sekadar menggantikan sistem manual dengan teknologi baru, tetapi juga memerlukan perubahan budaya kerja serta kesiapan sumber daya manusia dalam mengoperasikan sistem tersebut. Oleh karena itu, pelatihan bagi pegawai pemerintah menjadi faktor kunci dalam memastikan bahwa sistem keuangan digital dapat berjalan secara optimal (Busri et al., 2023). Tanpa adanya pelatihan yang memadai, implementasi digitalisasi keuangan bisa mengalami hambatan, baik dari segi teknis maupun administratif.

Penting juga bagi pemerintah untuk terus menyesuaikan kebijakan dengan perkembangan teknologi agar sistem keuangan digital dapat terus berkembang dan memberikan manfaat yang maksimal. Selain itu, integrasi antara sistem keuangan daerah dengan kebijakan nasional harus dilakukan secara sinergis, agar pengelolaan keuangan dapat berjalan dengan standar yang lebih baik dan sesuai dengan regulasi yang berlaku (Akbar et al., 2023).

Berdasarkan berbagai faktor yang telah diuraikan, digitalisasi dalam pengelolaan keuangan negara dan daerah memiliki peran yang sangat krusial dalam meningkatkan efektivitas dan efisiensi tata kelola pemerintahan. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis sejauh mana digitalisasi dapat meningkatkan efektivitas pengelolaan keuangan negara dan daerah, serta mengidentifikasi berbagai tantangan yang dihadapi dalam penerapan sistem ini. Selain itu, penelitian ini juga mengevaluasi kontribusi digitalisasi terhadap transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan publik. Berdasarkan analisis yang dilakukan, penelitian ini berupaya merumuskan strategi yang dapat diterapkan untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas sistem keuangan berbasis digital, sehingga mampu mendukung pengelolaan keuangan negara dan daerah secara lebih optimal.

Metode Penelitian

Penelitian ini menerapkan metode kualitatif dengan pendekatan Analisis Sekunder Kualitatif (Qualitative Secondary Analysis atau QSA), yang melibatkan penggunaan dan analisis ulang data kualitatif yang telah tersedia. Data dikumpulkan dari berbagai sumber, termasuk penelitian terdahulu, makalah kerja, prosiding konferensi, media massa, dan dokumen lain yang relevan dengan topik penelitian. Pengumpulan data dilakukan secara sistematis dengan kriteria seleksi yang jelas, seperti relevansi terhadap pertanyaan penelitian, kredibilitas sumber, dan kelengkapan informasi yang disajikan. Proses analisis data mengikuti tiga tahap utama sesuai dengan pendekatan deskriptif: reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Pada tahap reduksi data, informasi dari berbagai dokumen disaring dan dipilih sesuai dengan fokus penelitian, mengeliminasi data yang tidak relevan atau kurang berkualitas. Data yang telah direduksi kemudian disajikan dalam bentuk narasi tematik atau visualisasi, seperti tabel atau diagram, untuk mendukung analisis. Tahap terakhir adalah penarikan kesimpulan, di mana hasil sintesis temuan digunakan untuk menjawab pertanyaan penelitian secara terintegrasi.

Validitas data dilakukan triangulasi sumber dengan membandingkan informasi dari berbagai dokumen yang berasal dari sumber berbeda untuk mengidentifikasi konsistensi, kesenjangan, atau perbedaan dalam data. Langkah ini bertujuan untuk mengurangi bias, meningkatkan keandalan temuan, dan memperkuat dasar analisis. Dengan menerapkan pendekatan Analisis Sekunder Kualitatif yang berfokus pada evaluasi mendalam data sekunder, penelitian ini diharapkan dapat memberikan wawasan yang komprehensif mengenai topik yang diteliti.

Hasil dan Pembahasan

1. Peran Digitalisasi dalam Meningkatkan Efektivitas Pengelolaan Keuangan Daerah

Digitalisasi telah membawa perubahan signifikan dalam sistem pengelolaan keuangan negara dan daerah. Salah satu manfaat utama yang dirasakan adalah peningkatan efektivitas dalam pencatatan, pengelolaan, dan pelaporan keuangan pemerintah. Dengan adanya sistem berbasis digital, proses administrasi yang sebelumnya dilakukan secara manual kini dapat diotomatisasi, mengurangi potensi kesalahan manusia serta mempercepat proses pencairan dan alokasi anggaran (Iswandari, 2021). Sistem e-budgeting, misalnya, memungkinkan pemerintah untuk menyusun dan mengelola anggaran secara lebih terstruktur dan transparan. Dengan sistem ini, setiap pengeluaran dapat dipantau secara real-time, memastikan bahwa dana dialokasikan dengan tepat sesuai perencanaan awal. Selain itu, sistem digital juga mendukung integrasi data antara pemerintah pusat dan daerah, sehingga memudahkan koordinasi dalam pengelolaan keuangan (Rahmadany, 2024). Selain dalam proses penyusunan anggaran, digitalisasi juga membantu dalam pemantauan dan pengendalian keuangan daerah. Sistem seperti Sistem Informasi Keuangan Daerah (SIKD) memungkinkan pemerintah untuk melihat kondisi keuangan secara langsung, mengidentifikasi potensi ketidaksesuaian anggaran, dan segera melakukan koreksi jika diperlukan (Sudrajat, 2021). Dengan demikian, digitalisasi memastikan bahwa keuangan negara dan daerah dikelola dengan lebih efisien dan sesuai dengan prinsip tata kelola yang baik.

2. Tantangan dalam Implementasi Digitalisasi Keuangan di Pemerintah Daerah

Meskipun digitalisasi memberikan banyak manfaat, implementasinya masih menghadapi berbagai tantangan, terutama di daerah-daerah yang memiliki keterbatasan infrastruktur teknologi. Beberapa daerah di Indonesia masih memiliki akses internet yang terbatas, sehingga menghambat penerapan sistem keuangan digital secara optimal. Infrastruktur yang tidak memadai membuat proses pencatatan dan pelaporan keuangan digital sering mengalami gangguan, sehingga memengaruhi efektivitas pengelolaan keuangan daerah (Kurniawan & Arti, 2020). Selain tantangan infrastruktur, kurangnya kompetensi sumber daya manusia (SDM) dalam mengoperasikan sistem digital juga menjadi kendala. Banyak pegawai pemerintah daerah yang masih terbiasa dengan sistem manual dan mengalami kesulitan dalam beradaptasi dengan teknologi baru. Hal ini menyebabkan implementasi digitalisasi berjalan lebih lambat dan tidak optimal. Untuk mengatasi masalah ini, pemerintah perlu mengadakan pelatihan secara berkala guna meningkatkan literasi digital para aparatur negara, terutama di daerah-daerah yang baru mulai menerapkan sistem keuangan berbasis digital (Iswandari, 2021). Tantangan lainnya adalah faktor resistensi terhadap perubahan. Beberapa instansi pemerintahan masih enggan beralih ke sistem digital karena sudah terbiasa dengan metode konvensional yang telah digunakan selama bertahun-tahun. Padahal, sistem manual memiliki banyak kekurangan, seperti rentan terhadap kesalahan pencatatan, kurang transparan, dan memakan waktu lama dalam proses administrasi. Oleh karena itu, perlu ada sosialisasi dan kebijakan yang mendorong perubahan budaya kerja menuju digitalisasi, agar para pemangku kepentingan dapat lebih menerima serta memahami manfaat dari sistem digital dalam pengelolaan keuangan negara dan daerah (Rahmadany, 2024).

3. Kontribusi Digitalisasi terhadap Transparansi dan Akuntabilitas Keuangan Publik

Salah satu aspek penting dari pengelolaan keuangan negara dan daerah adalah transparansi. Digitalisasi memungkinkan informasi terkait anggaran dan pengeluaran pemerintah dapat diakses dengan lebih mudah oleh pihak yang berkepentingan, termasuk masyarakat dan lembaga pengawas. Dengan adanya sistem keuangan berbasis digital, laporan keuangan dapat dipantau secara langsung tanpa harus melalui proses yang berbelit-belit, sehingga meminimalkan

peluang terjadinya korupsi dan penyalahgunaan anggaran (Sudrajat, 2021). Penerapan e-audit oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dan instansi terkait telah meningkatkan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan negara dan daerah. Dengan sistem ini, auditor dapat mengakses data keuangan secara langsung melalui sistem digital, tanpa harus melakukan pemeriksaan fisik yang memakan waktu lama. Hal ini mempercepat proses audit, mengurangi potensi manipulasi data, dan memastikan bahwa laporan keuangan yang dihasilkan lebih akurat dan dapat dipertanggungjawabkan (Ratnawati & Susilowati, 2022). Selain itu, sistem digital juga memungkinkan pemerintah untuk membuat laporan keuangan yang lebih sistematis dan terstruktur. Laporan tersebut tidak hanya bermanfaat bagi auditor, tetapi juga bagi masyarakat yang ingin mengetahui bagaimana dana publik dikelola. Dengan adanya keterbukaan informasi ini, masyarakat dapat ikut mengawasi penggunaan anggaran negara dan daerah, sehingga meningkatkan kepercayaan publik terhadap pemerintah (Rahmadany, 2024).

4. Implementasi Digitalisasi Keuangan di Kota Medan

Implementasi digitalisasi keuangan di Kota Medan telah menjadi fokus utama pemerintah daerah dalam upaya meningkatkan efisiensi, transparansi, dan akuntabilitas pengelolaan keuangan. Langkah-langkah strategis yang telah diambil mencakup berbagai aspek, mulai dari transaksi keuangan hingga pengelolaan data dan peningkatan kapasitas sumber daya manusia. Berikut adalah uraian mendalam mengenai implementasi tersebut:

A. Digitalisasi Transaksi Keuangan Daerah

Pemerintah Kota Medan telah mengadopsi sistem transaksi keuangan digital untuk mengoptimalkan pendapatan daerah dan mencegah kebocoran. Langkah ini mencakup penerapan platform pembayaran elektronik yang memudahkan masyarakat dalam memenuhi kewajiban pajak dan retribusi. Menurut Wali Kota Medan, Bobby Nasution, digitalisasi transaksi keuangan daerah tidak hanya mengoptimalkan pendapatan tetapi juga mencegah kebocoran yang selama ini terjadi.

B. Pembentukan Tim Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah (TP2DD)

Untuk mendukung pengembangan transaksi pembayaran digital, Pemerintah Provinsi Sumatera Utara, termasuk Kota Medan, telah membentuk TP2DD. Gubernur Sumatera Utara, Edy Rahmayadi, menyatakan bahwa implementasi Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah (ETPD) diharapkan dapat meningkatkan transparansi transaksi keuangan daerah, mendukung tata kelola, serta mengintegrasikan sistem pengelolaan keuangan daerah guna mengoptimalkan pendapatan.

C. Peningkatan Manajemen Keuangan UMKM melalui Digitalisasi

Pemerintah Kota Medan juga fokus pada peningkatan manajemen keuangan pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) melalui digitalisasi. Wali Kota Medan menilai bahwa manajemen keuangan pelaku UMKM belum optimal dan perlu didukung dengan literasi digital serta akses terhadap teknologi finansial. Langkah ini diharapkan dapat meningkatkan efisiensi operasional UMKM dan mendorong inklusi keuangan di Kota Medan.

D. Penggunaan Teknologi Informasi dalam Pengelolaan Keuangan

Penerapan teknologi informasi dalam pengelolaan keuangan daerah menjadi instrumen penting untuk meningkatkan efisiensi, transparansi, dan akuntabilitas. Penggunaan platform digital memungkinkan pemerintah daerah melakukan analisis data keuangan dengan lebih baik, sehingga mendukung pengambilan keputusan yang tepat dalam pengelolaan anggaran.

E. Evaluasi dan Langkah Perbaikan Pengelolaan Keuangan

Evaluasi terhadap pengelolaan keuangan Kota Medan menunjukkan perlunya langkah perbaikan, termasuk digitalisasi data keuangan. Penyediaan platform digital yang memungkinkan masyarakat mengakses laporan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) secara real-time dapat mendorong transparansi. Selain itu, perluasan basis pajak dan pemutakhiran sistem pemungutan dapat menjadi solusi untuk meningkatkan pendapatan daerah.

F. Implementasi Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD)

Pemerintah Kota Medan telah mengimplementasikan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) untuk mendukung pengelolaan keuangan yang lebih efisien. Namun, hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi SIPD di beberapa wilayah belum maksimal dalam

mendukung pengelolaan keuangan daerah. Oleh karena itu, diperlukan upaya peningkatan kapasitas dan infrastruktur untuk memaksimalkan manfaat SIPD.

G. Strategi Pengelolaan Keuangan menggunakan Aplikasi E-Wallet

Penggunaan aplikasi e-wallet sebagai strategi pengelolaan keuangan pada pelaku bisnis, termasuk coffee shop di Kota Medan, dapat memberikan banyak manfaat. Data transaksi dari aplikasi e-wallet dapat langsung terhubung dengan sistem pelaporan atau pencatatan keuangan, sehingga meningkatkan akurasi dan efisiensi.

H. Analisis Penerapan Fintech pada UMKM

Penerapan teknologi finansial (fintech) menawarkan kemudahan dan efisiensi kepada UMKM dalam hal pengelolaan keuangan berbasis teknologi, seperti pelaporan keuangan digital, teknologi pembayaran, dan pinjaman online. Fintech meningkatkan pasar dengan menawarkan layanan transaksi keuangan digital yang mudah dan sederhana kepada individu yang belum mempunyai rekening bank.

Melalui berbagai inisiatif tersebut, Kota Medan berkomitmen untuk terus mengembangkan dan memperluas implementasi digitalisasi keuangan guna mencapai pengelolaan keuangan daerah yang lebih baik dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

5. Strategi Optimalisasi Digitalisasi dalam Pengelolaan Keuangan Daerah

Untuk memastikan bahwa digitalisasi dalam pengelolaan keuangan dapat berjalan secara optimal, pemerintah perlu menerapkan beberapa strategi yang tepat.

Pertama, pemerintah harus meningkatkan infrastruktur teknologi informasi di seluruh daerah, terutama di wilayah yang masih memiliki akses internet terbatas. Dengan infrastruktur yang memadai, seluruh daerah dapat mengakses sistem digital dengan baik dan menghindari hambatan teknis dalam pengelolaan keuangan mereka (Akbar et al., 2023).

Kedua, peningkatan kapasitas sumber daya manusia (SDM) dalam bidang teknologi digital harus menjadi prioritas. Pemerintah perlu menyediakan pelatihan secara rutin kepada pegawai negeri sipil agar mereka lebih memahami penggunaan sistem digital dalam pengelolaan keuangan. Dengan SDM yang kompeten, proses digitalisasi dapat berjalan lebih lancar dan efisien (Rahmadany, 2024).

Ketiga, penguatan keamanan siber dalam sistem keuangan digital sangat penting untuk mencegah risiko kebocoran data dan serangan siber. Pemerintah harus menerapkan regulasi keamanan data yang ketat serta membangun sistem yang mampu mendeteksi dan menangani ancaman siber dengan cepat (Iswandari, 2021).

Keempat, digitalisasi harus didukung dengan integrasi sistem keuangan pusat dan daerah. Dengan sistem yang terintegrasi, pengelolaan anggaran dapat dilakukan dengan lebih efektif, dan pelaporan keuangan dapat disusun sesuai standar nasional. Hal ini akan meningkatkan efisiensi tata kelola keuangan negara dan daerah secara keseluruhan (Sudrajat, 2021).

Dengan menerapkan strategi-strategi tersebut, pemerintah dapat memastikan bahwa digitalisasi tidak hanya menjadi alat bantu, tetapi juga menjadi solusi utama dalam meningkatkan efisiensi, transparansi, dan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan negara dan daerah.

Kesimpulan

Penelitian ini mengungkap bahwa digitalisasi memiliki peran krusial dalam meningkatkan efisiensi, transparansi, dan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah. Implementasi sistem digital seperti e-budgeting dan e-audit telah membantu mempercepat proses administrasi keuangan, meminimalkan kesalahan pencatatan, serta meningkatkan pengawasan terhadap anggaran publik. Studi kasus di Kota Medan menunjukkan bahwa penerapan digitalisasi keuangan telah memberikan dampak positif, terutama dalam meningkatkan keterbukaan informasi dan efisiensi tata kelola keuangan daerah.

Namun, tantangan utama dalam implementasi digitalisasi masih mencakup keterbatasan infrastruktur teknologi, kurangnya kompetensi SDM dalam mengoperasikan sistem digital, serta

risiko keamanan data. Oleh karena itu, diperlukan strategi yang komprehensif untuk mengoptimalkan digitalisasi, termasuk peningkatan kapasitas sumber daya manusia melalui pelatihan, penguatan sistem keamanan siber, serta integrasi sistem keuangan pusat dan daerah. Dengan langkah-langkah tersebut, digitalisasi diharapkan dapat semakin memperkuat efektivitas pengelolaan keuangan daerah, serta memastikan bahwa dana publik dikelola dengan lebih efisien dan akuntabel.

Daftar Pustaka

- Aridho Aridho, Eko Sinaga, Fani Nadapdap, & Widya Purba. (2024). Implementasi Pajak Digital di Kota Medan: Tantangan dan Solusi Ahmad . *JURNAL HUKUM, POLITIK DAN ILMU SOSIAL*, 3(3), 289–293. <https://doi.org/10.55606/jhpis.v3i3.3915>
- Akbar Maulana, Z. P. (2023). Local Government Accelaration towards Agile Governance. *Journal of Humanities and Social Sciences Studies*, 5(1), 105-113. <https://doi.org/10.32996/jhsss.2023.5.1.14>
- Akbar, A. ., Imsar, I., & Silalahi, P. R. . (2024). ANALISIS PENERAPAN FINTECH PADA UMKM DI KOTA MEDAN DALAM PERSFEKTIF MAQASHID SYARIAH. *Jurnal Manajemen Terapan Dan Keuangan*, 13(03), 806–820. <https://doi.org/10.22437/jmk.v13i03.36719>
- Kurniawan, D., & Mumpuni Arti, R. (2020). Comparative Study of a Cybersecurity Curriculum To Support Digital Transformation in The Public Sector. *Iapa Proceedings Conference*, 547-576. <https://doi.org/10.30589/proceedings.2020.427>.
- Hilma Lathifah, A. F. (2024). Pengelolaan Keuangan Daerah dengan Sistem Transaksi Non Tunai pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah (BPKPD) Kota Tebing Tinggi (Stud pada Pelaksanaan Penerimaan Keuangan Daerah). *Prosiding Frima Festival Riset Ilmiah Manajemen dan Akuntansi* 1(7), 585-592. <https://doi.org/10.55916/frima.v1i7>
- Ihyani Malik, N. W. (2023). Implementation of Agile Governance in Bureaucratic Reform 4.0 at the Puslatbang KMP LAN Makassar City. *Jurnal Administrasi Publik*, 19(1), 86-119. <https://doi.org/10.52316/jap.v19i1.134>
- Iswandari, B. A. (2021). Jaminan Atas Pemenuhan Hak Keamanan Data Pribadi Dalam Penyelenggaraan E-Government Guna Mewujudkan Good Governance. *Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM*, 28(1), 115–138. <https://doi.org/10.20885/iustum.vol28.iss1.art6>
- Izzaty, K. N., & Solovida, G. T. (2023). DIGITALISASI PENGELOLAAN KEUANGAN DAN KESIAPAN IMPLEMENTASI SAK EMKM SEBAGAI UPAYA PENINGKATAN KUALITAS LAPORAN KEUANGAN UMKM. *Jurnal Akuntansi Dan Pajak*, 24(1). <https://doi.org/10.29040/jap.v24i1.7874>
- Kornelius Harefa, K. T. (2021). Pengaruh Penerimaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Terhadap Peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) (Studi Empiris Pada Kabupaten/Kota Provinsi Sumatera Utara Periode 2017-2020). *JAKPI - Jurnal Akuntansi, Keuangan & Perpajakan Indonesia*, 9(2), 1-9. <https://doi.org/10.24114/jakpi.v9i2.27804>
- Kusuma Ratnawati, C. S. (2022). Implication of Digital Economy and Financial Technology Towards Performance of Financial Services Sector in Indonesia. *MIX: Jurnal Ilmiah Manajemen*, 12(1) 140-157. http://dx.doi.org/10.22441/jurnal_mix.2022.v12i1.011
- Lubis, P. K. D. (2018). Analisis Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan Pada Dinas Pendapatan Daerah Kota Medan .*JAKPI - Jurnal Akuntansi, Keuangan & Perpajakan Indonesia* , 6(1). <https://doi.org/10.24114/jakpi.v6i01.11167>

-
- Nasirwan, M. M. R. (2017). AKUNTABILITAS DAN TRANSPARANSI BERBASIS BAGI HASIL (ANALISIS TERHADAP KARYAWAN TOKO DI KOTA BEUREUNUEN). *J-EBIS (Jurnal Ekonomi Dan Bisnis Islam)*, 2(2). <https://doi.org/10.32505/v4i1.1235>
- Kardina, M., Frinaldi, A., Asnil, A., & Putri, N. (2024). Penilaian Penggunaan Teknologi Informasi Dalam Pengelolaan Keuangan Daerah Dan Dampaknya Terhadap Kinerja Pelayanan Publik Di Indonesia. *Professional: Jurnal Komunikasi Dan Administrasi Publik*, 11(2), 615–620. <https://doi.org/10.37676/professional.v11i2.7231>
- Putri Kemala Dewi Lubis, N. H. (2017). Analisis Rasio Keuangan untuk Mengukur Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Labuhan Batu. *KITABAH*, 1(1), 21-45.
- Rahmadany, A. (2024). Transformasi Digital Pengelolaan Keuangan Daerah dalam Mewujudkan Agile government pada Reformasi Birokrasi 4.0. *Jurnal Ilmiah Administrasi Pemerintahan Daerah*, 16(2), 195-209. <https://doi.org/10.33701/jiapd.v16i2.4809>
- Hasanah, Siti & Siregar, Tapi Rumondang. (2021). Pengaruh Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah, Sistem Informasi Akuntansi, Sistem Pengendalian Intern, dan Kompetensi Sumber Daya Manusia Terhadap Kualitas Laporan Keuangan OPD di Kabupaten Labuhanbatu. *JAKPI - Jurnal Akuntansi, Keuangan & Perpajakan Indonesia*. 9(1), 39-47. <https://doi.org/10.24114/jakpi.v9i1.25706>
- Asdi Sudrajat, G. (2021). The Acceleration of Digital Transformation in the Ministry of Finance: What Are the Driven Factors?. *Iapa Proceedings Conference*, 45-59. <https://doi.org/10.30589/proceedings.2021.514>.
- Mardiah Gea, U. (2023). IMPLEMENTATION OF QRIS TRANSACTIONS IN THE DEVELOPMENT OF THE DIGITAL ECONOMY IN MEDAN CITY: IMPLEMENTASI TRANSAKSI QRIS DALAM PERKEMBANGAN ECONOMI DIGITAL DI KOTA MEDAN. *UPMI Proceeding Series*, 1(01), 246–251. <https://doi.org/10.55751/ups.v1i01.42>
- Ningtyas, V. N. C., & Angin, R. (2023). Inovasi Menuju Transformasi Digital dalam Pelayanan Publik Kajian Sistem Manajemen Pelayanan Desa (SIMPEDA) di Desa Balung Lor. *Pubmedia Social Sciences and Humanities*, 1(3), 11. <https://doi.org/10.47134/pssh.v1i3.127>
- Zuliana Zulkarnaen, Z. T. (2023). Strategi Pengelolaan Keuangan Menggunakan Aplikasi E-Wallet Pada Pelaku Bisnis Coffee Shop Kota Medan Di Era Digitalisasi. *Jurnal Investasi Islam*, 39-57.